

## **MENINGKATKAN KONEKTIVITAS DAN INFRASTRUKTUR PERBATASAN SEBAGAI PENGUNGKIT EKONOMI KABUPATEN SAMBAS MENUJU INDONESIA EMAS 2045**

**Desmi Sutami**

*Universtitas Tanjungpura*

### ***ABSTRACT***

*This paper aims to explain the importance of strengthening connectivity and border infrastructure development in promoting regional economic growth toward the Indonesia Emas 2045 vision. The study employs a descriptive-quantitative approach using secondary data. The results show that regional connectivity plays a strategic role in reducing logistics costs, expanding local product markets, and increasing regional fiscal independence. A collaborative strategy among the central government, local governments, private sector, and communities is required to transform Sambas into a competitive and sustainable cross-border economic hub.*

**Keywords:** connectivity, infrastructure, border area, economic development, *Indonesia Emas 2045*.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya penguatan konektivitas dan pembangunan infrastruktur perbatasan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah menuju visi *Indonesia Emas 2045*. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptifkuantitatif berbasis data sekunder. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa konektivitas wilayah berperan strategis dalam menurunkan biaya logistik, memperluas pasar produk lokal, dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Diperlukan strategi kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat untuk menjadikan Sambas sebagai simpul ekonomi lintas batas yang berdaya saing dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** konektivitas, infrastruktur, perbatasan, pembangunan ekonomi, *Indonesia Emas 2045*.

### **1. PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu perekonomian. Secara umum, pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai peningkatan kapasitas produksi suatu negara, yang tercermin dari bertambahnya output barang dan jasa pada satu periode dibandingkan periode sebelumnya. Todaro (2009) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain akumulasi modal seperti investasi pada sarana fisik (tanah, peralatan, dan infrastruktur), ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam, serta kemajuan teknologi yang mendorong inovasi, peningkatan keterampilan, dan efektivitas kerja. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan suatu negara dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya tersebut secara produktif.

Pembangunan ekonomi wilayah perbatasan memiliki makna strategis bagi Indonesia yang berorientasi menuju *Indonesia Emas 2045*. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, salah satu prioritas utama adalah memperkuat konektivitas

antarwilayah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dan mendorong pemerataan ekonomi nasional (Bappenas, 2024). Kabupaten Sambas, sebagai salah satu wilayah perbatasan di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, memiliki posisi penting sebagai gateway ekonomi lintas negara di Pulau Kalimantan.

Meskipun memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan lintas batas, tingkat keterhubungan antarwilayah di Sambas masih terbatas. Infrastruktur jalan dan jembatan belum merata, biaya logistik tinggi, serta konektivitas digital di beberapa kecamatan perbatasan masih rendah. Kondisi ini menyebabkan rendahnya nilai tambah ekonomi dan ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Padahal, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dapat menurunkan transaction cost dan meningkatkan produktivitas daerah (World Bank, 2023).

Peran Pemerintah Daerah di era Otonomi Daerah dalam melaksanakan pembangunan semakin besar. Pelaksanaan pembangunan bukan hanya terkonsentrasi pada satu sektor atau bidang, tetapi saling adanya keterkaitan antara sektor atau bidang. Tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi akan terkait dengan pembangunan sumber daya manusia termasuk didalamnya peningkatan kualitas hidup seperti peningkatan gizi, pembangunan infrastruktur, pengembangan kelembagaan sosial-ekonomi dan faktor-faktor lainnya. Pembangunan ekonomi sendiri pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat serta mengentaskan kemiskinan dan memperluas lapangan kerja di berbagai sektor ekonomi.

Penguatan konektivitas dan infrastruktur menjadi pondasi utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan seperti Sambas. Melalui konektivitas fisik, ekonomi, dan digital yang kuat, Sambas berpotensi menjadi penggerak utama ekonomi perbatasan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang inklusif dan berdaya saing global.

## 2. KAJIAN LITERATUR

Konektivitas wilayah merupakan pondasi penting dalam teori pertumbuhan ekonomi regional modern. Peningkatan konektivitas diyakini mampu mengurangi hambatan spasial dan mempercepat integrasi ekonomi antarwilayah. Menurut World Bank (2023), konektivitas yang kuat berperan signifikan dalam menurunkan biaya logistik, memperluas akses pasar, dan memperkuat efisiensi rantai pasok. Infrastruktur yang memadai seperti jalan, pelabuhan, jembatan, dan jaringan telekomunikasi—menjadi enabler yang memperlancar pergerakan barang, jasa, dan manusia, sehingga mendorong produktivitas sektor riil dan investasi daerah.

Dalam perspektif teori pembangunan wilayah, konektivitas tidak hanya dipahami sebagai sarana transportasi fisik, tetapi juga sebagai mekanisme integrasi ekonomi yang memperkuat hubungan antarwilayah (Kanai, 2022). Ketika konektivitas meningkat, potensi lokal dapat dioptimalkan melalui penurunan transaction cost, efisiensi distribusi produk, serta peningkatan akses terhadap pasar regional dan global. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur konektivitas menjadi kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terutama bagi daerah perbatasan seperti Kabupaten Sambas yang berfungsi sebagai pintu gerbang ekonomi lintas negara.

Teori Neoklasik yang dikemukakan oleh Solow Swan (1956) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Infrastruktur publik termasuk dalam bentuk modal produktif yang meningkatkan efisiensi produksi. Selain itu Teori Pertumbuhan Endogen oleh Romer (1990) menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi juga berasal dari inovasi dan kebijakan pemerintah. Infrastruktur dan

konektivitas merupakan faktor endogen yang memicu inovasi ekonomi lokal melalui peningkatan akses informasi dan pasar. Sedangkan Perroux (1955) memperkenalkan konsep *growth pole*, yaitu wilayah atau sektor yang menjadi pusat pertumbuhan dan menularkan efek ekonomi ke wilayah sekitarnya. Infrastruktur dan konektivitas berperan dalam memperkuat hubungan antara pusat pertumbuhan dengan hinterland-nya

Sementara itu konsep desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh Musgrave (1959) dan Oates (1972) menegaskan bahwa pelimpahan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah memberikan fleksibilitas bagi daerah untuk merancang kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, dan geografis masing-masing wilayah. Desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, dan mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi. Dalam konteks wilayah perbatasan, teori tersebut menjadi sangat relevan karena pembangunan infrastruktur produktif memiliki dampak ganda. Di satu sisi mendorong aktivitas ekonomi lokal, dan di sisi lain meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi indikator kemandirian fiskal. Dengan infrastruktur yang baik, daerah dapat memperluas basis pajak, meningkatkan investasi, dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan pandangan Oates (1972) bahwa efektivitas desentralisasi fiskal ditentukan oleh kemampuan daerah untuk mengelola potensi ekonominya sendiri secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas fiskal daerah perbatasan melalui pembangunan konektivitas fisik dan digital merupakan langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Visi jangka panjang pembangunan nasional menyatakan kawasan perbatasan memiliki posisi strategis sebagai “beranda depan negara” yang mencerminkan kedaulatan sekaligus potensi ekonomi Indonesia. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, arah kebijakan pembangunan perbatasan diarahkan tidak hanya untuk menjaga keamanan dan keutuhan wilayah, tetapi juga untuk mengembangkan kawasan tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdaya saing (Bappenas, 2024). Silaban (2024) menjelaskan bahwa investasi infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tertinggal karena mampu meningkatkan mobilitas barang dan efisiensi biaya distribusi. Hasil serupa juga dikemukakan oleh Lestari (2025), yang meneliti keterkaitan antara infrastruktur jalan dan kapasitas fiskal daerah di ibu kota negara baru Indonesia, dan menemukan bahwa pembangunan jalan berkualitas baik dapat memperkuat keuangan daerah sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi lokal.

Risal et al. (2022) memaparkan bahwa banyak wilayah perbatasan di Indonesia masih menghadapi keterbatasan fasilitas sosial-ekonomi, infrastruktur, dan konektivitas, yang menjadikan pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan lebih lamban dibandingkan wilayah non-perbatasan. Selanjutnya, Chen et al. (2020) menyatakan bahwa penurunan biaya transportasi antarnegara meningkatkan investasi lintas batas. Darajati dkk. (2023) menekankan bahwa penguatan konektivitas dan infrastruktur di kawasan perbatasan harus diiringi dengan regulasi, koordinasi antarinstansi, dan layanan publik yang memadai agar manfaatnya bagi masyarakat lokal maksimal.

Bagi Kabupaten Sambas, arah kebijakan tersebut memiliki relevansi langsung, mengingat posisinya sebagai wilayah perbatasan yang telah memiliki infrastruktur lintas negara melalui PLBN Aruk. Penguatan konektivitas dan infrastruktur ekonomi di Sambas menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yakni Indonesia yang maju, inklusif, dan berdaya saing global melalui pemerataan pertumbuhan hingga wilayah terluar dan perbatasan.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif, yang bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai kondisi konektivitas dan infrastruktur di Kabupaten Sambas sebagai wilayah perbatasan strategis Indonesia di Kalimantan Barat. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menggambarkan fenomena pembangunan secara faktual, kontekstual, dan mendalam tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti (Creswell, 2018). Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini berupaya menelaah sejauh mana tingkat keterhubungan antarwilayah di Kabupaten Sambas mendukung aktivitas ekonomi, khususnya dalam perdagangan lintas batas dan integrasi wilayah menuju visi Indonesia Emas 2045.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sambas periode 2020-2024 dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang menyediakan informasi terkait kondisi infrastruktur, transportasi, dan volume perdagangan lintas batas di PLBN Aruk. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas 2021-2026 sebagai acuan kebijakan lokal.

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Kabupaten Sambas

Kabupaten Sambas merupakan salah satu wilayah strategis di Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah mencapai 6.395 km<sup>2</sup>, terdiri atas 19 kecamatan dan 195 desa. Secara geografis, Kabupaten Sambas terletak di bagian utara Kalimantan Barat dan berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia di sebelah utara, Kabupaten Bengkayang di selatan, Kabupaten Mempawah di timur, dan Laut Natuna di sebelah barat. Posisi ini menjadikan Sambas memiliki fungsi ganda, yakni sebagai beranda depan (*frontier region*) dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus sebagai koridor ekonomi lintas batas antara Indonesia dan Malaysia.

Secara administratif, pusat pemerintahan berada di Kota Sambas, yang berperan sebagai simpul utama kegiatan pemerintahan, perdagangan, dan jasa. Wilayah utara, seperti Kecamatan Sajingan Besar dan Paloh, merupakan kawasan perbatasan langsung yang memiliki potensi ekonomi tinggi namun masih menghadapi keterbatasan aksesibilitas. Topografi wilayah yang didominasi dataran rendah, lahan pertanian, dan pesisir menjadikan sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Berdasarkan data BPS (2024), kontribusi sektor pertanian mencapai sekitar 35% terhadap PDRB, sedangkan sektor perdagangan dan transportasi terus tumbuh seiring meningkatnya aktivitas lintas batas melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk yang diresmikan pada tahun 2017.

Jumlah penduduk Kabupaten Sambas pada tahun 2024 mencapai sekitar 655 ribu jiwa dengan kepadatan rata-rata 110 jiwa per km<sup>2</sup> (BPS, 2024). Komposisi penduduk menunjukkan dominasi kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebesar 67%, yang memberikan potensi besar bagi peningkatan kapasitas ekonomi daerah. Namun demikian, tantangan yang dihadapi antara lain masih terbatasnya kesempatan kerja formal, rendahnya diversifikasi ekonomi, serta tingkat kemiskinan yang mencapai 6,53% pada tahun 2024, sedikit di atas rata-rata provinsi Kalimantan Barat (6,32%). Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan konektivitas dan infrastruktur ekonomi menjadi kunci dalam mendorong transformasi produktivitas tenaga kerja lokal, terutama di sektor primer.

Masyarakat Sambas dikenal memiliki keberagaman etnis dan budaya, yang terdiri atas etnis Melayu, Dayak, dan Tionghoa, serta minoritas lainnya. Interaksi sosial dan perdagangan lintas negara dengan masyarakat Sarawak telah berlangsung lama, menciptakan pola kehidupan sosial-budaya yang terbuka dan adaptif terhadap dinamika regional. Meskipun demikian, disparitas akses pendidikan dan layanan kesehatan masih menjadi isu penting di beberapa kecamatan perbatasan, yang berdampak pada ketimpangan kualitas sumber daya manusia antarwilayah.

#### 4.2. Kondisi Jalan

Jaringan jalan merupakan sistem transportasi darat yang memiliki peran penting dalam memperlancar arus barang dan jasa, sekaligus menghubungkan desa-desa penghasil komoditas dengan pasar pengolahan dan distribusi. Oleh karena itu, semakin meningkatnya aktivitas pembangunan dan potensi ekonomi daerah, tuntutan terhadap perbaikan kualitas dan aksesibilitas jalan juga semakin tinggi. Infrastruktur jalan pada dasarnya menjadi urat nadi perekonomian daerah, sehingga investasi pemerintah di sektor ini harus mampu mendorong tumbuhnya usaha produktif serta memperlancar distribusi input dan pemasaran hasil produksi. Kondisi jalan yang baik akan mempersingkat waktu tempuh, menurunkan biaya logistik, serta membantu masyarakat memperoleh barang kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau karena biaya produksi dapat ditekan. penguatan infrastruktur jalan bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga instrumen strategis untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Panjang jalan menurut menurut status pengawasan dan kondisi jalan periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1 Panjang Jalan Kabupaten Sambas Menurut Status Pengawasan dan Kondisi Jalan Tahun 2020-2024 (Dalam Km)**

| Status Pengawasan | Baik     | Sedang | Rusak  | Rusak Berat | Jumlah   |
|-------------------|----------|--------|--------|-------------|----------|
| Nasional          |          |        |        |             | 240,62   |
| Propinsi          | 83,57    | 18,85  | 5,68   | -           | 108,14   |
| Kabupaten         | 400,47   | 369,24 | 273,18 | 59,32       | 1.102,21 |
| Desa              | 389,04   | 222,29 | 100,16 | 187,04      | 898,63   |
| 2024              |          |        |        |             | 2.349,60 |
| 2023              | 968,62   | 748,56 | 253,44 | 341,87      | 2.312,52 |
| 2022              | 944,49   | 744,70 | 255,96 | 367,37      | 2.312,52 |
| 2021              | 1.299,58 | 367,84 | 190,36 | 279,35      | 2.137,12 |
| 2020              | 1.326,90 | 344,85 | 189,39 | 275,08      | 2.136,22 |

*Sumber: BPS Kabupaten Sambas, 2025.*

Secara rinci kondisi jaringan jalan di Kabupaten Sambas selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.2 Kondisi Jalan Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024**

| Tahun | Panjang Jalan (km) | Kondisi Baik (%) | Sedang (%) | Rusak (%) | Rusak Berat (%) |
|-------|--------------------|------------------|------------|-----------|-----------------|
| 2020  | 1.102,21           | 58,03            | 11,41      | 10,24     | 20,32           |
| 2021  | 1.102,21           | 66,12            | 9,14       | 9,01      | 15,73           |
| 2022  | 1.102,21           | 30,94            | 37,76      | 81,96     | 19,90           |
| 2023  | 1.102,21           | 33,68            | 38,11      | 11,18     | 17,04           |
| 2024  | 1.102,21           | 36,33            | 37,52      | 9,11      | 17,04           |

Sumber: BPS Kabupaten Sambas, 2025 (data diolah penulis).

Secara rinci perkembangan panjang menurut jenis permukaannya di Kabupaten Sambas sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Sambas 2020–2024 (dalam Km)**

| Jenis Permukaan Jalan | 2020     | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    |
|-----------------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Aspal                 | 392,67   | 398,27   | 349,57  | 371,30  | 400,47  |
| Kerikil               | 156,42   | 167,87   | 418,96  | 398,41  | 369,24  |
| Tanah                 | 553,12   | 536,07   | 274,36  | 273,18  | 273,18  |
| Lainnya               | -        | -        | 59,32   | 59,32   | 59,32   |
| Jumlah                | 1.102,21 | 1.102,21 | 1102,21 | 1102,21 | 1102,21 |

Sumber: BPS Kabupaten Sambas, 2025.

Lima tahun terakhir (2020-2024), kondisi infrastruktur jalan menunjukkan variasi perkembangan. Proporsi jalan berkondisi baik meningkat dari 58% pada 2020 menjadi 66% pada 2021, namun menurun drastis pada 2022 akibat keterbatasan anggaran selama pandemi. Seiring dengan pemulihan ekonomi, pada tahun 2024 dari panjang jalan 1.102 km tersebut 36,33 persen jalan sudah diaspal; 33,50 persen jalan kerikil dan 24,78 persen jalan tanah.. Meski menunjukkan tren pemulihan, angka-angka ini masih menandakan bahwa lebih dari separuh jaringan jalan di Sambas belum berada dalam kondisi optimal, sehingga menimbulkan implikasi ekonomi yang signifikan.

#### 4.3. Perkembangan Perekonomian

Struktur perekonomian suatu wilayah ditentukan oleh aktivitas produksi yang dijalankan oleh masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor usaha yang ada di dalamnya. Komposisi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor yang turut membentuk kontribusi antar sektor terhadap PDRB. Kontribusi tersebut kemudian tercermin dalam kinerja pertumbuhan ekonomi daerah, di mana sektor-sektor utama saling memengaruhi dalam menciptakan nilai tambah dan memperkuat daya saing daerah.

Fasilitas dan infrastruktur wilayah berkontribusi pada aspek daya saing daerah. Semakin baik fasilitas dan infrastruktur wilayah maka akan semakin menarik minat investor untuk berinvestasi demikian pula sebaliknya. Kondisi jalan yang baik akan mempermudah kegiatan ekonomi baik dalam pengadaan input maupun pemasaran output. Waktu yang digunakan akan

semakin singkat, sehingga biaya yang dikeluarkan dapat diminimalisir. Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh kebutuhan mereka dengan harga yang memadai karena biaya produksi yang dapat ditekan oleh produsen.

Menurut Kuznets dalam Todaro (2009) mengatakan pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan dalam menyediakan berbagai barang ekonomi kepada masyarakatnya sehingga kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian dalam hal teknologi, institusional, dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Disimpulkan bahwa kenaikan input dalam proses produksi dalam mengadakan barang dan jasa bagi masyarakat ditentukan oleh kemajuan dalam hal teknologi. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan tolak ukur dalam melihat keberhasilan perekonomian di suatu negara. Pengukuran pertumbuhan ekonomi secara konvensional biasanya dengan cara menghitung peningkatan presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan akan dicapai jika didukung oleh infrastruktur yang memadai. Gambaran tentang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas berdasarkan sektor atau lapangan usaha tahun 2020 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sambas Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020-2024**

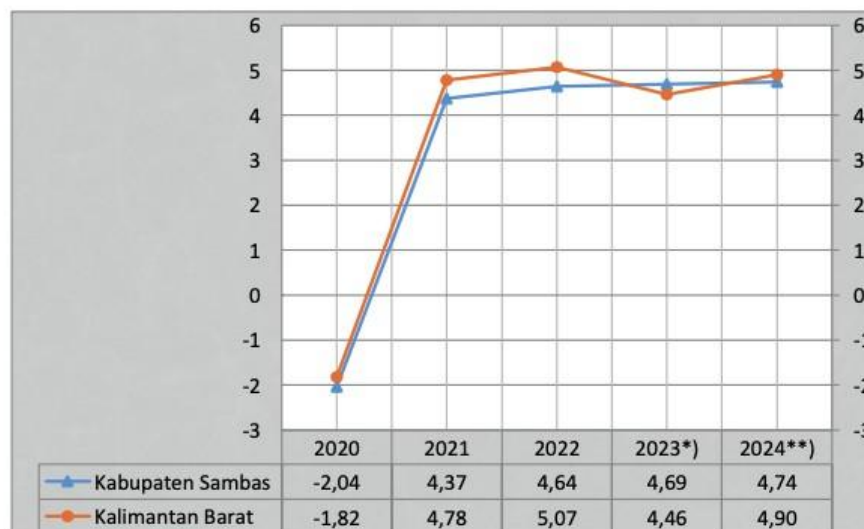
| Lapangan Usaha (seri 2010)                                        | Tahun  |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                   | 2020   | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 1,00   | 4,05  | 3,15  | 1,74  | 3,40  |
| B. Pertambangan dan Penggalian                                    | -2,96  | 5,77  | 2,10  | 5,84  | 5,71  |
| C. Industri Pengolahan                                            | -3,03  | 4,91  | 4,14  | 0,98  | 4,03  |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas                                      | -7,65  | 1,64  | 4,07  | 14,99 | 5,60  |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 4,98   | 7,09  | 7,44  | 7,19  | 6,29  |
| F. Konstruksi                                                     | -6,05  | 7,16  | 2,38  | 6,6   | 5,60  |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | -6,98  | 3,21  | 9,47  | 7,09  | 4,95  |
| H. Transportasi dan Pergudangan                                   | -10,94 | -1,12 | 15,54 | 5,68  | 5,85  |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | -19,18 | 7,62  | 8,40  | 6,03  | 6,30  |
| J. Informasi dan Komunikasi                                       | 8,12   | 6,56  | 5,05  | 8,81  | 7,08  |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | -0,30  | 3,88  | 0,19  | 5,74  | 5,19  |
| L. Real Estat                                                     | 0,88   | 3,38  | 0,17  | 11,55 | 11,55 |
| M,N. Jasa Perusahaan                                              | -6,24  | 0,26  | 10,33 | 10,77 | 7,57  |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,62   | -0,82 | -0,79 | 5,06  | 4,92  |
| P. Jasa Pendidikan                                                | -5,37  | 2,55  | 5,07  | 6,63  | 5,74  |

|                                       |              |             |             |             |             |
|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 19,57        | 27,46       | 6,83        | 16,06       | 7,18        |
| R,S,T,U. Jasa lainnya                 | -16,55       | 2,48        | 11,91       | 11,15       | 5,74        |
| <b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b> | <b>-2,04</b> | <b>4,37</b> | <b>4,64</b> | <b>4,69</b> | <b>4,74</b> |

Sumber: Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2025

Pertumbuhan PDRB sebagaimana dijelaskan sebelumnya berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah tergambar berikut ini:

**Grafik 4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat (%) Tahun 2020 – 2024**



Sumber: RKPD Sambas (2025)

Tahun 2020, di saat terjadi pandemi Covid-19, perekonomian Kabupaten Sambas tumbuh negatif (terkontraksi) sebesar -2,04%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat (-1,82%). Kemudian pada tahun 2021, kembali mencapai pertumbuhan ekonomi positif, yakni sebesar 4,39%. Pada tahun 2023, capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,68%, meningkat sedikit dibandingkan tahun 2022 yang capaiannya sebesar 4,63%. Sedangkan pada tahun 2024 capaiannya sebesar 4,74%. Sedangkan untuk melihat kontribusi setiap sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sambas dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.5 Kontribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 (persen)**

| Lapangan Usaha                                                    | Tahun |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                   | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 33,62 | 33,78 | 33,4  | 32,78 | 32,56 |
| B. Pertambangan dan Penggalian                                    | 1,22  | 1,22  | 1,19  | 1,18  | 1,19  |
| C. Industri Pengolahan                                            | 11,64 | 12,07 | 12,18 | 11,41 | 11,57 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,04  | 0,04  |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,06  | 0,05  |
| F. Konstruksi                                                     | 8,08  | 8,39  | 8,32  | 8,47  | 8,86  |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 17,01 | 16,67 | 17,49 | 18,06 | 17,88 |
| H. Transportasi dan Pergudangan                                   | 2,26  | 2,13  | 2,4   | 2,52  | 2,52  |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 1,81  | 1,83  | 1,91  | 1,93  | 1,97  |
| J. Informasi dan Komunikasi                                       | 4,56  | 4,54  | 4,4   | 4,39  | 4,34  |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 2,5   | 2,51  | 2,47  | 2,46  | 2,39  |
| L. Real Estat                                                     | 3,33  | 3,24  | 3,02  | 3,07  | 3,16  |
| M,N. Jasa Perusahaan                                              | 0,35  | 0,33  | 0,34  | 0,36  | 0,36  |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 6,65  | 6,24  | 5,94  | 6,15  | 6,06  |
| P. Jasa Pendidikan                                                | 4,52  | 4,31  | 4,17  | 4,2   | 4,15  |
| Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 1,58  | 1,89  | 1,9   | 2,11  | 2,1   |
| R,S,T,U. Jasa lainnya                                             | 0,77  | 0,74  | 0,77  | 0,82  | 0,82  |
| Produk Domestik Regional Bruto                                    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |

*Sumber: BPS Kabupaten Sambas, 2025*

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, struktur perekonomian Kabupaten Sambas pada periode 2020-2024 masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sekitar 32-34 persen terhadap PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat masih banyak bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam. Namun, kontribusi sektor ini cenderung menurun dari 33,62 persen pada tahun 2020 menjadi 32,56 persen pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya pergeseran dan mulai tumbuhnya peran sektor-sektor non-pertanian dalam perekonomian daerah.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi penyumbang terbesar kedua dengan kontribusi rata-rata 17–18 persen. Peningkatan pada sektor ini terutama tampak setelah tahun 2021, yang menunjukkan pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatnya arus barang pasca pandemi. Di sisi lain, sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi stabil sekitar 11 - 12 persen, yang menunjukkan masih terbukanya peluang pengembangan hilirisasi produk pertanian di daerah.

Di samping itu, sektor Konstruksi memperlihatkan tren peningkatan kontribusi dari 8,08 persen menjadi 8,86 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yang menggambarkan adanya percepatan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, fasilitas publik, serta kawasan ekonomi. Sektor-sektor jasa seperti Akomodasi dan Makan Minum, Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta Transportasi dan Pergudangan menunjukkan pola pertumbuhan yang saling berkaitan. Setelah mengalami tekanan akibat pembatasan sosial pada tahun 2020–2021, sektor-sektor ini kembali pulih seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Sektor Transportasi dan Pergudangan berperan penting dalam mendukung pergerakan barang dan mobilitas masyarakat di Kabupaten Sambas, terutama karena wilayah ini berada di kawasan perbatasan. Kontribusi sektor ini sempat menurun pada tahun 2021 menjadi 2,13 persen akibat pembatasan mobilitas selama pandemi. Namun, sejak 2022 kontribusinya kembali meningkat hingga mencapai 2,52 persen pada tahun 2023 dan stabil pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas distribusi dan logistik mulai pulih dan bahkan berkembang seiring membaiknya kondisi ekonomi.

Walaupun kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap total PDRB masih relatif kecil (sekitar 2-2,5 %), tren kenaikan yang konsisten menunjukkan arah perkembangan positif dan berkelanjutan. Peningkatan ini juga memiliki implikasi fiskal yang penting: semakin tinggi aktivitas transportasi dan logistik, semakin besar potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak kendaraan, retribusi terminal, dan aktivitas jasa pergudangan. Dengan demikian, penguatan konektivitas fisik dan logistik di Kabupaten Sambas berpotensi menjadi motor penggerak kemandirian fiskal daerah, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi perbatasan dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

#### **4.4. Aktivitas Ekonomi Lintas Batas di PLBN Aruk**

Pembukaan border pada tahun 2011 dan peresmian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk pada tahun 2017 diharapkan memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas. Meningkatnya arus keluar-masuk barang dan mobilitas penduduk melalui pintu lintas batas berpotensi menggerakkan sektor perdagangan, khususnya pemasaran produk pertanian dan hasil lokal lainnya. Pemanfaatan peluang ini secara optimal dapat meningkatkan nilai tambah komoditas daerah, menarik wisatawan, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Selain itu, pengembangan kawasan di sekitar PLBN Aruk perlu didukung secara berkelanjutan untuk mempercepat tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di wilayah perbatasan. Pengembangan destinasi wisata seperti Temajuk juga membutuhkan dukungan infrastruktur jalan yang memadai, baik pada jalur Nasional maupun Provinsi, agar aksesibilitas dan konektivitas kawasan wisata tersebut semakin lancar dan berdaya saing.

Berdasarkan laporan BNPP (2024), nilai ekspor resmi melalui PLBN Aruk menunjukkan peningkatan signifikan, dari Rp15,515 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp21,372 miliar pada tahun 2023 atau tumbuh sekitar 37,7% dalam satu tahun. Pada tahun 2024, komoditas ekspor yang mendominasi masih berasal dari sektor kelautan dan perikanan dengan nilai Rp15,95 miliar, disusul komoditas pertanian dan perkebunan yang mencapai Rp4,68 miliar. Komoditas-komoditas tersebut memiliki daya tarik kuat di pasar Sarawak, Malaysia, dan menjadi tulang punggung aktivitas perdagangan lintas batas di kawasan perbatasan Sambas, menunjukkan bahwa peningkatan konektivitas fisik dan akses pasar lintas negara merupakan faktor kunci dalam memperkuat struktur ekonomi lokal.

#### 4.5. Hasil Pembahasan

Infrastruktur jalan sangat penting karena menjadi fondasi pergerakan ekonomi, mempermudah mobilitas orang dan barang, serta membuka akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2020, panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Sambas sebesar 639,59 km, namun pandemi COVID-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi hingga -2,04 persen karena distribusi barang dan mobilitas masyarakat terhambat. Pada 2021, peningkatan panjang jalan baik menjadi 728,74 km diikuti dengan pemulihan kinerja ekonomi yang tumbuh 4,37 persen. Fenomena ini menunjukkan hubungan positif antara peningkatan kualitas jaringan jalan dan percepatan pemulihan ekonomi: semakin baik akses jalan, semakin lancar arus distribusi hasil produksi, sehingga aktivitas perdagangan dan konsumsi daerah kembali bergerak. Meski pada 2022 kondisi jalan baik menurun menjadi 341,06 km karena keterbatasan anggaran pascapandemi, pertumbuhan ekonomi tetap meningkat menjadi 4,63 persen, menandakan bahwa selain kualitas jalan, terdapat faktor lain yaitu meningkatnya aktivitas perdagangan lintas batas melalui PLBN Aruk serta pulihnya sektor pertanian dan perikanan. Pada 2023 dan 2024, panjang jalan baik kembali mengalami peningkatan bertahap menjadi 371,19 km dan 400,47 km, diikuti stabilnya pertumbuhan ekonomi di rentang 4,6-4,7 persen. Konsistensi ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan perbaikan infrastruktur jalan menjadi penopang stabilitas ekonomi daerah.

Pentingnya infrastruktur jalan bagi Kabupaten Sambas tidak terlepas dari struktur perekonomian daerah yang masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor-sektor berbasis pedesaan ini bergantung pada konektivitas fisik antara sentra produksi, lokasi pengolahan, dan pasar. Kualitas jalan yang buruk akan meningkatkan biaya logistik, memperlambat distribusi, menurunkan nilai tambah komoditas, dan pada akhirnya menekan pendapatan petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Oleh karena itu, pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan bukan hanya proyek fisik, tetapi merupakan instrumen strategis dalam mengurangi kesenjangan wilayah, memperkuat integrasi ekonomi desa–kota, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Perbaikan konektivitas fisik melalui peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik serta penguatan infrastruktur strategis antarwilayah berperan penting dalam menurunkan *transaction cost* dan memperkuat aktivitas ekonomi lokal. Dampak positifnya tercermin dari meningkatnya kinerja sektor transportasi dan pergudangan yang diikuti oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin stabil. Meluasnya aktivitas ekonomi turut memperbesar basis pajak dan retribusi daerah, terutama dari sektor perdagangan, jasa transportasi, serta UMKM di kawasan perbatasan yang semakin aktif dalam kegiatan produksi dan distribusi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa konektivitas wilayah perbatasan memiliki peran strategis sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan, perluasan jaringan logistik, serta pengembangan fasilitas lintas batas memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi mobilitas barang dan jasa, penguatan sektor perdagangan, serta perluasan pasar produk lokal yang mampu mendorong peningkatan pendapatan dan kapasitas fiskal daerah. Investasi pada infrastruktur wilayah perbatasan terbukti memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap sektor-sektor produktif melalui peningkatan efisiensi produksi, kelancaran arus distribusi, serta perluasan akses pasar antarwilayah. Infrastruktur yang semakin memadai mempercepat sirkulasi ekonomi lokal dan memperkuat dinamika ekonomi berbasis konektivitas yang berdaya saing.

Struktur perekonomian Kabupaten Sambas yang hingga kini masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menuntut ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai untuk mendukung kelancaran aktivitas produksi dan distribusi. Pengembangan sektor-sektor berbasis pedesaan pada dasarnya sangat bergantung pada jaringan jalan sebagai penghubung antara sentra produksi, pusat pengolahan, dan pasar. Apabila kondisi jalan berada dalam keadaan buruk atau tidak merata, maka proses alokasi sumber daya, distribusi faktor produksi, dan pemasaran hasil menjadi terhambat. Hal ini tidak hanya menurunkan efisiensi ekonomi, tetapi juga mengurangi nilai tambah komoditas serta menekan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur jalan menjadi prasyarat penting dalam mengurangi kesenjangan wilayah, memperkuat integrasi ekonomi desa-kota, dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah secara berkelanjutan.

Kawasan perkotaan seperti Kecamatan Sambas, Tebas, dan Pemangkat dalam struktur kewilayahan berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, perdagangan, jasa, pemerintahan, serta pemberdayaan UMKM. Infrastruktur yang relatif lebih baik menjadikan kawasan ini pusat perputaran ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, kawasan perdesaan menjadi tulang punggung produksi komoditas unggulan seperti jeruk siam, padi, kelapa sawit, dan lada, yang tidak hanya dipasarkan secara lokal tetapi juga berpotensi ekspor melalui PLBN Aruk. Sinergi antara kawasan perkotaan dan perdesaan menjadi kunci pembangunan berkelanjutan, sehingga diperlukan penguatan konektivitas melalui pembangunan jalan penghubung, pasar desa, dan logistik distribusi hasil pertanian.

Namun demikian, keterbatasan infrastruktur transportasi darat, terutama di Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar, masih menjadi hambatan utama. Kondisi jalan yang rusak dan akses yang terbatas menyebabkan biaya distribusi logistik meningkat, memperlambat mobilitas masyarakat, serta menghambat layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten merupakan kewenangan pemerintah daerah. Akan tetapi, keterbatasan anggaran dan kapasitas teknis sering menjadi kendala sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, sektor swasta, dan masyarakat. Pendekatan kolaboratif seperti skema public-private partnership (PPP) dapat menjadi alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur secara merata.

Sebagai wilayah perbatasan, Kabupaten Sambas memiliki posisi strategis yang berperan sebagai pintu gerbang dalam integrasi ekonomi domestik dan global. Keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk menjadi pengungkit utama pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan perdagangan lintas negara, arus barang dan jasa, serta pembangunan infrastruktur penunjang. Pemerintah daerah memanfaatkan aspek geoekonomi dengan mengoptimalkan letak geografis Sambas agar pembangunan tidak hanya memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga meningkatkan daya saing kawasan perbatasan. Ketahanan ekonomi Sambas juga ditopang oleh sektor pertanian dan perkebunan yang terbukti mampu bertahan saat pandemi Covid-19. Basis ekonomi berbasis sumber daya alam serta ikatan sosial budaya masyarakat menjadi faktor penting yang memastikan stabilitas ekonomi di tengah guncangan eksternal.

Kontribusi perdagangan lintas batas terhadap perekonomian daerah masih belum optimal, meskipun perkembangan ini menunjukkan tren positif. Sejumlah hambatan struktural masih perlu mendapatkan perhatian. Regulasi perdagangan sembako lintas batas yang semakin ketat telah membatasi ruang gerak pelaku usaha lokal, sehingga diperlukan sosialisasi dan pendampingan agar pelaku usaha dapat mematuhi standar yang berlaku. Selain itu, masih terjadi kendala pada infrastruktur logistik, seperti terminal barang dan land port di sisi Malaysia yang

belum beroperasi penuh, serta keterbatasan transportasi yang menghambat kelancaran distribusi komoditas ekspor. Di sisi pelaku usaha, transaksi dalam skala besar belum dapat dilakukan secara perseorangan dan harus melalui badan usaha resmi, sehingga aspek legalitas dan kelembagaan menjadi penting untuk diperkuat.

Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan penguatan konektivitas wilayah, terutama menuju PLBN Aruk dan kawasan strategis seperti Temajuk, bukan hanya berfungsi memperlancar mobilitas barang dan penduduk, tetapi juga menjadi fondasi transformasi ekonomi perbatasan. Infrastruktur yang memadai memungkinkan komoditas lokal bersaing di pasar lintas negara, memperluas akses pemasaran, menekan biaya logistik, serta meningkatkan nilai tambah bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Pada saat yang sama, meningkatnya aktivitas ekspor melalui PLBN Aruk menunjukkan bahwa kawasan perbatasan bukan lagi sekadar area pinggiran, tetapi simpul pertumbuhan ekonomi baru yang memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Sambas secara berkelanjutan. Dengan penguatan koordinasi antarinstansi, penyempurnaan regulasi, dan pembangunan infrastruktur yang terarah, Sambas memiliki peluang nyata untuk menjadi beranda depan perekonomian Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

## **5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kemajuan konektivitas fisik mendukung aktivitas ekonomi lintas batas. Peningkatan panjang jalan mantap serta operasionalisasi PLBN Aruk telah menurunkan biaya logistik dan mempercepat mobilitas perdagangan antarnegara. Konektivitas jalan utama Aruk-Sambas-Singkawang kini menjadi salah satu koridor ekonomi strategis di Kalimantan Barat.
2. Pemerataan akses infrastruktur masih menjadi tantangan. Sebagian besar kemajuan infrastruktur masih terfokus pada jalur nasional, sedangkan jalan kabupaten dan antar desa masih dalam kondisi terbatas. Ketimpangan akses ini berdampak pada kesenjangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.
3. Peningkatan konektivitas belum sepenuhnya diikuti oleh transformasi ekonomi daerah. Sektor pertanian dan perikanan masih mendominasi PDRB Sambas, sementara kontribusi sektor transportasi dan perdagangan lintas batas baru meningkat moderat. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur baru menjadi fondasi, belum menjadi pendorong utama diversifikasi ekonomi.
4. Sinergi kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan perbatasan. Masih terdapat kesenjangan dalam implementasi program lintas instansi, terutama pada aspek pembiayaan dan koordinasi teknis. Penguatan kelembagaan daerah menjadi keharusan agar pembangunan konektivitas berjalan efektif dan berkelanjutan.
5. Secara strategis, konektivitas wilayah Sambas berkontribusi terhadap visi Indonesia Emas 2045. Dengan memperkuat PLBN Aruk sebagai simpul logistik dan perdagangan, wilayah perbatasan diharapkan tidak lagi menjadi “halaman belakang” negara, tetapi beranda depan pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan konektivitas Sambas mencerminkan arah transformasi menuju ekonomi inklusif dan terintegrasi di kawasan barat Indonesia.

## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan dan analisis tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur Fisik. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan dan pemeliharaan koridor jalan Aruk-Sajingan-Sambas-Singkawang sebagai jalur utama distribusi ekonomi lintas batas. Infrastruktur ini harus diintegrasikan dengan pusat logistik dan pelabuhan darat di kawasan PLBN Aruk guna mendukung efisiensi rantai pasok.
2. Digitalisasi Ekonomi Daerah. Perluasan jaringan internet dan peningkatan literasi digital bagi UMKM perbatasan akan memperluas akses pasar nasional dan regional. Pemanfaatan *digital marketplace* dapat menjadi instrumen untuk memperkuat ekspor produk lokal yang berdaya saing.
3. Integrasi Program Pusat dan Daerah. Sinkronisasi antara proyek strategis nasional dan program daerah penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan serta memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif dan berkelanjutan.
4. Kolaborasi Multipihak (*Public-Private Partnership*). Penerapan model kemitraan pemerintah dan swasta (PPP) perlu diperluas dalam pembangunan logistik, kawasan ekonomi perbatasan, dan pengelolaan PLBN. Kolaborasi ini akan memperkuat kapasitas investasi daerah sekaligus mempercepat pengembangan kawasan ekonomi lintas batas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas. (2025). *Kabupaten Sambas dalam angka tahun 2025* (Vol. 34).
- Badan Perencanaan dan Pengembangan Riset Daerah Kabupaten Sambas. (2025). *Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas Tahun 2026*.
- Badan Perencanaan dan Pengembangan Riset Daerah Kabupaten Sambas. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029*.
- Bappenas. (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045: Indonesia Emas 2045*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Risal, S., Irawanto, I., Hergianasari, P., Rahma, A. A., & Pramudiana, I. D. (2022). Border Development Model on the Human Development Aspects for Sustainable Community. *Jurnal Borneo Administrator*, 18(2), 125-138.  
<https://jba.lan.go.id/article/download/971/369>.
- Chen, M. X., & Lin, C. (2020). Geographic connectivity and cross-border investment: the belts, roads and skies. *Journal of Development Economics*, 146, 102469.  
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304387820300444>
- Silaban, D.A. (2025). Analysis Of The Impact Of Infrastructure Investment On Local And Regional Economic Growth In Developing Countries. *Jurnal of Regulation Law and Gonerance*, 3(05), 239-244.  
<https://doi.org/10.57185/jlarg.v3i5.117>
- Lestari, R. I., Wardono, B., Handajani, M., Supari, S., Juniati, H., Sunarno, M. T. D., & Prayogi, E. (2025). The interplay of road infrastructure and regional finance in driving economic growth: Insights from East Kalimantan. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 11(1), 100444.  
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2199853124002385>

- Darajati, M. R., Syafei, M., & Sudagung, A. D. (2023). Border Area Management: How Should Indonesia Reform?. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 4(3), 375405.  
<https://mail.online-journal.unja.ac.id/Utipossidetis/article/download/25741/16494>
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th Edition. SAGE Publications.
- Solow, R. (1956). *A Contribution to the Theory of Economic Growth*. Quarterly Journal of Economics.
- Romer, P. (1990). *Endogenous Technological Change*. Journal of Political Economy.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1980). Public finance in theory and practice.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Kanai, M. (2022). *Infrastructure-Led Regimes and the Urbanization of Connectivity*. Urban Studies Journal, 59(3), 401–423.
- World Bank. (2023). *Infrastructure for Inclusive Growth in Indonesia*. Washington, D.C.